

Kebijakan Monitoring dan Evaluasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 1-3 Maret 2017

Dasar Hukum

- Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- Instruksi Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017.

Latar Belakang Penyusunan SOP Monev

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI bahwa Instruksi Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 belum menggambarkan secara detil terkait pembagian peran dan ruang lingkup serta tenggat waktu dalam pelaksanaan monev;
- Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa output pelaksanaan kegiatan monev di bidang-bidang Bappeda tidak seragam;
- Progres monev secara keseluruhan belum diperhitungkan sebagai kinerja;
- Progres capaian target RJMD belum dimonitor secara berkala dalam tahun anggaran berjalan.

Subyek Monev

- Para Asisten Sekretaris Daerah
- Bappeda
- Para Asisten Sekko/Kab
- Sub Bappeko/Kab

Obyek Monev

- Progres pelaksanaan program/ kegiatan prioritas SKPD/UKPD tahun anggaran berjalan termasuk pencapaian kinerja output/ hasil;
- Progres pelaksanaan program/ kegiatan unggulan/ prioritas Gubernur yang dilaksanakan SKPD/UKPD dalam rangka pencapaian sasaran target kinerja program RPJMD;
- Sasaran fungsional program/ kegiatan yang dilaksanakan SKPD/UKPD dalam rangka pencapaian sasaran target kinerja program RPJMD;
- Tabel pengajuan koordinasi online;
- Progres eMonev dengan indikator merah dan kuning;
- Obyek monev lainnya sesuai dengan agenda rapat monev.

Stakeholder Money

- Inspektorat
- BPKD
- BPAD
- BPPBJ
- Diskominfotik
- Inspektorat Pembantu Tingkat Kota/Kabupaten
- KPKD
- KPAD
- ULP Tingkat Kota/ Kabupaten.

Penyelenggara Monev Provinsi

- Biro Tata Pemerintahan
- Biro Perekonomian
- Biro PKLH
- Biro Kesos
- Bidang Perencanaan Bappeda.

Penyelenggara Monev Wilayah Kota/Kab

- Bagian Tata Pemerintahan
- Bagian Perekonomian
- Bagian PKLH
- Bagian Kesos
- Sub Bappeko/Kab.

Waktu Pelaksanaan Money

- Sekurang-kurangan satu kali dalam sebulan
- Sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan

Sarana Pendukung Monev

- Format-format yang digunakan dalam pelaksanaan monev
- Sistem Informasi Pendukung Monev

Sistem Informasi Pendukung Monev

- eBudgeting
- SIPKD
- eMonev
- SIRUP
- SPSE
- SI Aset

Paparan Draf SOP Monev Provinsi DKI Jakarta

Tanya Jawab

Kesimpulan Diskusi

شُكْرًا جَزِيلًا

Thank You So Much